

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 17 Nomor 3, November 2023: 255-398
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Kepala Editor	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Dewan Redaksi	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Redaktur Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P 5. B. Lora Christyanti, S.I.P 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si. 8. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

4. Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung

6. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Dr. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H.
Politeknik Imigrasi

8. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LLM
Fakultas Hukum Universitas Udayana

9. Ridwan Arifin, S.H., LLM
Fakutas Hukum Universitas Negeri Semarang

10. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum., MPA
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai

11. Mutia Cherawaty Thalib, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

12. Mochammad Tanzil Multazam., S.H., M.Kn.
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

13. Darwance, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

DAFTAR ISI

1. Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten Pada Entrepreneurial University
Policy Advocacy for The Elimination of Patent Maintenance Fee at Entrepreneurial University 255-268
Ima Mayasari
2. Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten
Creation and Invention of Artificial Intelligence Output in The Perspective of Copyright and Patent 269-288
Richard Jatimulya Alam Wibowo
3. Membangun Model Tata Kelola Strategis dalam Strategi Peningkatan Informasi Keimigrasian Melalui Expo dan Konferensi di Indonesia, Pendekatan Metodologi *Soft System*
Building a Model of Strategic Governance in Immigration Information Improvement Strategies Through Expo and Conferences in Indonesia, a Soft System Methodology Approach .. 289-308
Aditya Sarsito, Rachma Fitriati
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
Legal Drafters in Legislative Drafting: an Analysis of The PermenPANRB Number 1 of 2023 Concerning Functional Positions 309-326
Ahmad Jazuli, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Nugroho, Insan Firdaus
5. Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur Dalam Masyarakat
The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society 327-348
Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti
6. Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jaminan dalam Perbankan
Execution of Trade Secret as Object of Guarantee in Banking 349-364
Ni Nyoman Indah Pratiwi, Ryka Yuliana
7. Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*
Originality Of Song and/or Music Produced by Artificial Intelligence 365-384
Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah
8. *Legalization Of Public Documents Through Apostille:a Legal Reform In Public Services* 385-398
Winsherly Tan, Asmin Patros, Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi ketiga pada bulan November 2023.

Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *Entrepreneurial University*; Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten; Membangun Model Tata Kelola Strategis dalam Strategi Peningkatan Informasi Keimigrasian Melalui Expo dan Konferensi di Indonesia, Pendekatan Metodologi *Soft System*; Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional; Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur dalam Masyarakat; Pengeksekusian Rahasia Dagang sebagai Objek Jaminan dalam Perbankan; Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*; *Legalization of Public Documents Through Apostille: A Legal Reform in Public Services*.

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal.

Volume 17 Nomor 2, Juli 2023

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2578-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Policy Advocacy for The Elimination of Patent Maintenance Fee at Entrepreneurial University

Ima Mayasari

Advocating for the ellimination of patent maintanance feees in Higher Education, especially for Entrepreneurial Universities (EU), is essential. The number of patents is the primary indicator in determining the most innovative university. Therefore, the Minister of Law and Human Rights in 2020 adapted by issuing Permenkumham 20/2020 concerning Requirements and Procedures for Imposing Certain Tariffs on Patent and Copyright. According to Permenkumham 20/2020, in some instances, tariffs on patent services can be imposed in the amount of zero rupiahs, including for Higher Education. The research problem is How to advocate for a policy to eliminate patent maintenance fees at an EU?. This research aims to analyze Policy Advocacy for the Elimination of Patent Maintenance Fees at EU. This study uses the Advocacy Strategy Framework concept proposed by Coffman. The research employs a qualitative research method. The results of the research show that the Advocacy Strategy Framework regarding the Elimination of Patent Maintenance Costs in Permenkumham Number 20/2020 is carried out through three changes, Awareness, Will, and Action carried out to audiences, namely Public and Influencers; Influencers; Influencers and Decision Makers; and Decision Makers. The researcher recommends to the Ministry of Law to compile a Roadmap and Action Plan regarding Elimination of Patent Maintenance Costs in Policy Products in the form of Ministerial Decrees Law and Human Rights or Decision of the Director General of IP regarding the Roadmap and/or Action Plan regarding this matter.

Keywords: *Patents; Patent Maintenance Fee; Policy Advocacy; Entrepreneurial University.*

Creation and Invention of Artificial Intelligence Output in The Perspective of Copyright and Patent

Richard Jatimulya Alam Wibowo

Artificial Intelligence (AI) has developed in such a way that it is capable of producing creations and inventions without human intervention through the training of a number of datasets. This normative juridical research aims to look at AI problems from the perspective of AI as a subject and AI results as an object of copyright and patent protection, as well as examining the implications of using creations in datasets to train AI. This research found that AI cannot become a creator and inventor because moral and human rights are reserved for humans, besides that AI cannot take advantage of the economic rights obtained from the protection of creation or patents. This study also found that the use of datasets containing other people's creations as AI development material has the potential to cause copyright violations. This potential is mitigated by several countries by implementing regulations related to TDM or data scraping for AI machine learning. Finally, this study also found that creations and inventions resulting from AI in general cannot become objects protected by the copyright regime unless they receive direct human contribution or are formulated in statutory regulations such as in the CGW copyright regime in the UK. This research suggests that practices in other countries in copyright and patent protection regimes related to AI can be used as a reference for legal politics in Indonesia to create AI regulations that balance the moral and economic rights of Creators and Inventors with the pace of AI innovation.

Keyword: *Artificial Intelligence, Copyrights, Patent.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Building a Model of Strategic Governance in Immigration Information Improvement Strategies Through Expo and Conferences in Indonesia, a Soft System Methodology Approach

Aditya Sarsito, Rachma Fitriati

In Indonesia, exhibitions and conferences on employment, tourism, or business are still organized separately and, therefore, need to be better integrated. These exhibitions and conferences contrast with the multi-dimensional nature of the immigration process itself. The organization of immigration services is always in a state of high dynamics because the immigration function is directly related to the mobility of people who are always pursuing change. This study aims to analyze the strategic governance model in increasing immigration information through exhibitions and conferences. This study uses soft systems methodology or SSM in modeling immigration-related activities. SSM is suitable to be used in this study because it can see complex social situations and involve various points of view. The results of the study show that it is necessary to establish an international mega event, namely the Indonesian Immigration Expo and Conference, as a forum for integrated strategic governance and collaborative governance to provide correct information about immigration in Indonesia. In addition, with the enactment of Government Regulation No. 40 of 2023 on immigration in the form of the "Golden Visa" policy, changes in the period of granting visas and residence permits are expected to attract more foreign investment. This grand international event is expected to act as a social network as it brings together embassies, business people, universities, and tourism agents in one place. This study recommends stakeholder engagement in encouraging strategic governance design and collaborative governance for each stakeholder.

Keywords: *Collaborative Governance; Immigration; Mega-Event, Expos, and Conference; Soft Systems Methodology; Strategic Governance, Golden Visa.*

Legal Drafters in Legislative Drafting: an Analysis of The PermenPANRB Number 1 of 2023 Concerning Functional Positions

Ahmad Jazuli, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Nugroho, Insan Firdaus

Explicitly, there are several significant differences between the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 1 of 2023 and the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 65 of 2021 concerning functional positions for drafting laws and regulations. The role of the drafters in the formation of statutory regulations and other legal drafting instruments requires good competence and knowledge so that they can be understood by users of statutory regulations and can be implemented in society. This study uses normative and empirical juridical methods and is analyzed with a qualitative approach. The results of the study found that the designer's role was constrained, namely: PermenPANRB Number 1 of 2023 is a form of strengthening the role of planning in statutory regulations and simplifying the organization in carrying out coaching for functional positions. There are still injuries in coaching, including obstacles to increase coaching caused by the lack of information on participation in level training which is a requirement for promotion; Quota limitations and opportunities to attend design training; it is not yet clear the differences and division of tasks between functional designers and legal analysts in the formation of laws and regulations. It is hoped that this latest PermenPANRB will focus more on the mandate of functional officials, especially designing on organizational performance capabilities, not just on achieving credit scores, so that it has an impact on strengthening organizational performance and public services.

Keywords: *drafters, legal drafting, coaching, regulation, role*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti

Structure-oriented or system-oriented movements will be more advanced than ordinary movements without relying on a system (normative). Structural legal aid is included in the movement of non-governmental organizations whose work system leads to structural or systemic changes, rather than changes at the individual or case-by-case level. The legal aid movement aims to ensure access to justice for people in need, especially women. With normative legal research, it is hoped that this can provide important findings about community colaboration, aid service providers, NGOs, and CSOs in societal change and equality. Thus, structural legal aid is a legal aid strategy based on the movement by eliminating power relations and gender inequality. In addition, village women paralegals can act as a movement to realize structural gender legal assistance for women, children, and other marginalized groups, and not just for the poor. The old perspective on traditional legal aid is not effective makes structural legal aid an alternative from legal aid, that can be encouraged by movement that can eliminate gender inequality and change existing structures in society. Women's participation as paralegals in a social movement can be optimized with support from NGOs and CSOs such as legal aid organizations. So that women's social movements produce gender equality, fulfill women's rights, and overcome discrimination. Apart from that, the legal aid movement needs to be focused and structured so that women's rights are fulfilled. The challenge for paralegals is to be able to go beyond the duits stated in the UUBH.

Keywords: *Structural Gender Legal Aid; Women Paralegal; Women's Social Movement.*

Execution of Trade Secret as Object of Guarantee in Banking

Ni Nyoman Indah Pratiwi, Ryka Yuliana

Laws and regulations related to trade secrets do not explicitly stipulate that trade secrets can be used as an object of guarantee in banking, causing legal uncertainty for the public and affecting the condition of trade secrets being used as collateral objects and the execution of goods for certain reasons. Writing this article aims to examine and analyze the regulation of trade secrets as an object of guarantee and the execution of trade secrets in the banking. Then, through this article it can provide benefits in the form of juridical understanding related to trade secret legal arrangements as objects of collateral in the banking, contribute literature, and can be considered by the government in establishing laws and regulations related to trade secrets as collateral objects. The legal issue in the form of a veil of norms makes this article use normative legal research methods using a statutory and contextual approach, followed by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that trade secrets can be used as collateral in the banking because they have economic value, can be transferred, and have no time limit as long as they are kept confidential. Then related to the execution of trade secrets can be carried out based on the execution of fiduciary guarantees considering that trade secrets can be charged with fiduciary guarantees. The method of execution is through executorial titles, public auctions, and private sales as stipulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. Trade secrets as an object of guarantee have been explicitly regulated and execution of trade secrets can be carried out through private sales and auctions as regulated in the German Lending and Taking Security Act. Based on this explanation, the solution to the legal issues in this article is that Indonesia can amend the Trade Secrets Law by considering German Legislation so as to provide legal certainty for the Indonesian people regarding trade secrets as an object of guarantee.

Keywords: *Guarantee Objects; Banking; Trade Secrets.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Originality Of Song and/or Music Produced by Artificial Intelligence

Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah

Machine learning algorithms in creating works become a problem in assessing the originality of the work of songs and / or music produced by artificial intelligence in the scope of copyright. This research aims to find out about the arrangements related to the originality of songs and / or music that exist in national and international provisions on the utilization of artificial intelligence within the scope of copyright. The research uses normative juridical methods with statutory approaches related to copyright arrangements, conceptual approaches, and comparative approaches. The results show that there is no definite limitation of originality in international legal provisions related to copyright while Indonesia contains originality restrictions on songs and / or music contained in law No.28 of 2014 concerning copyright. The existing provisions are not yet adequate in providing protection of songs and / or music produced by artificial intelligence like some countries that have formed a conception of protection in assessing issues related to originality. The establishment of regulations and affirmation of originality limits are things that need to be contained in Indonesian regulations to support the development of artificial intelligence technology.
Keywords: *Originality, Artificial Intelligence, Song and/or Music*

Legalization Of Public Documents Through Apostille:a Legal Reform In Public Services

Winsherly Tan, Asmin Patros, Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Indonesia is a country that has the objective of ensuring the welfare of its citizens. One effective way to achieve prosperity for its citizens is by implementing excellent public services, especially when it comes to the fulfillment of rights concerning the legalization of public documents. Therefore, this study is aimed to analyze the application of the Apostille convention in the legalization of public documents, and to investigate the changes in the law of public services related to the legalization of documents after the Apostille enactment. This legal study is categorized as a type of doctrinal analysis. Specifically, it is descriptive and analytical. Juridical and theoretical foundations were used for data analysis and the theoretical basis employed was the Theory of Legal Reform. The finding is consistent with the principles of the Legal Reform Theory. Legalization of public documents has undergone legal reform because legalization of public documents can be done online and in a short time. This shows that law, as a means of reform, has been realized because it has met the needs of society for the public. Despite the enhancement of public services, several aspects require careful consideration and improvement. This includes establishing effective cooperation with the Regional Office of Law and Human Rights, which acted as a liaison for Apostille services at the regional level. Additionally, the Regional Office of Law and Human Rights assume a pivotal role in overseeing the printing of certificates to ensure accessibility for the public.
Keywords: *Public Services, Apostille, Legalization*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten Pada *Entrepreneurial University*

Ima Mayasari

Advokasi kebijakan penghapusan biaya pemeliharaan paten pada Perguruan Tinggi (PT) khususnya *Entrepreneurial University* (EU) menjadi penting. Jumlah paten menjadi indikator utama dalam menetapkan universitas paling inovatif. Menkumham melakukan adaptasi dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, di mana dalam hal tertentu pengenaan tarif pada pelayanan paten dapat diberikan sebesar nol rupiah, termasuk bagi PT. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *EU*?. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Advokasi Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten pada *EU.* Penelitian ini menggunakan konsep *Advocacy Strategy Framework* dari Coffman. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Advocacy Strategy Framework* terkait Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Permenkumham Nomor 20/2020 dilakukan melalui tiga perubahan yaitu *Awareness*, *Will*, dan *Action* dengan empat *audiences* yaitu *Public and Influencers*; *Influencers*; *Influencers and Decision Makers*; dan *Decision Makers*. Peneliti merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk menyusun *Roadmap* dan Rencana Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dan Kebijakan Penghapusan Biaya Pemeliharaan Paten dalam Produk Kebijakan berupa Kepmenkumham atau KepDirjen KI terkait *Roadmap* dan/atau Rencana Aksi terkait hal ini.

Kata Kunci: Paten; Biaya Pemeliharaan Paten; Advokasi Kebijakan; *Entrepreneurial University.*

Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten

Richard Jatimulya Alam Wibowo

Kecerdasan buatan telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan ciptaan dan Invensi tanpa campur tangan manusia melalui pelatihan sejumlah *dataset*. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk melihat permasalahan AI dalam perspektif AI sebagai subjek dan hasil AI sebagai objek perlindungan hak cipta dan paten, serta mengkaji implikasi penggunaan ciptaan dalam *dataset* untuk melatih AI. Penelitian ini menemukan bahwa AI tidak dapat menjadi seorang Pencipta dan Inventor karena hak moral dan hak asasi diperuntukkan untuk manusia, selain itu AI juga tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi yang didapatkan dari perlindungan ciptaan atau paten. Kajian ini turut menemukan penggunaan *dataset* berisi ciptaan orang lain sebagai materi pengembangan AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Potensi ini dimitigasi oleh beberapa negara dengan penerapan regulasi terkait TDM atau data *scraping* untuk *machine learning* AI. Akhirnya kajian ini juga menemukan bahwa ciptaan dan Invensi hasil AI pada umumnya tidak dapat menjadi objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta kecuali mendapat kontribusi manusia secara langsung atau diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam rezim hak cipta CGW di Inggris. Penelitian ini menyarankan bahwa praktik-praktik di negara lain dalam rezim perlindungan hak cipta dan paten terkait AI dapat dijadikan acuan politik hukum di Indonesia untuk membuat regulasi AI yang menyeimbangkan hak moral dan hak ekonomi para Pencipta dan Inventor dengan laju inovasi AI.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Paten.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Membangun Model Tata Kelola Strategis dalam Strategi Peningkatan Informasi Keimigrasian Melalui Expo dan Konferensi di Indonesia, Pendekatan Metodologi *Soft System*

Aditya Sarsito, Rachma Fitriati

Di Indonesia, expo dan konferensi mengenai ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis masih diorganisir secara terpisah dan, maka dari itu, perlu diintegrasikan dengan lebih baik. Kegiatan-kegiatan expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensional dari proses keimigrasian. Organisasi layanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika tinggi karena fungsi dari keimigrasian secara langsung terkait dengan mobilitas orang yang selalu mengejar perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola strategis dalam meningkatkan informasi keimigrasian melalui expo dan konferensi. Studi ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam pemodelan aktivitas terkait imigrasi. SSM cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan pendirian sebuah acara besar internasional, yaitu Indonesia Immigration Expo and Conference, sebagai forum tata kelola strategis terintegrasi dan tata kelola kolaboratif untuk menyediakan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2023 tentang imigrasi dalam bentuk kebijakan "Golden Visa," perubahan dalam periode pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing. Acara internasional besar ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan sosial karena mengumpulkan kedutaan, pengusaha, universitas, dan agen pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif untuk setiap pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Imigrasi; Acara Besar, Pameran, dan Konferensi; Metodologi Perangkat Lunak; Tata Kelola Strategis, Visa Emas.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Ahmad Jazuli, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Nugroho, Insan Firdaus

Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan. Peran perancang dalam pembentukan peraturan dan penyusunan instrumen hukum lainnya membutuhkan kompetensi dan pengetahuan yang baik sehingga dapat dipahami oleh para pengguna peraturan perundang-undangan, dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta empiris dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perancang masih terkendala, antara lain: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 adalah salah bentuk penguatan peran perancang peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan organisasi dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional. Masih adanya kendala dalam pembinaan, antara lain: terhambatnya kenaikan pangkat perancang disebabkan oleh minimnya informasi keikutsertaan mengikuti diklat penjenjangan yang merupakan persyaratan kenaikan pangkat; keterbatasan kuota dan kesempatan untuk mengikuti diklat perancang; tidak jelasnya perbedaan dan pembagian tugas antara fungsional perancang dan fungsional analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasi PermenPANRB terbaru ini adalah lebih memfokuskan tugas pejabat fungsional khususnya perancang pada capaian kinerja organisasi, bukan hanya pada capaian angka kredit sehingga berdampak pada penguatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Kata Kunci: perancang, penyusunan instrumen hukum, pembinaan, peraturan, peran

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur Dalam Masyarakat

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti

Gerakan yang berorientasi terhadap struktur atau sistem akan lebih maju daripada gerakan biasa tanpa mengandalkan sistem (normatif). Bantuan Hukum Struktural (BHS) masuk dalam gerakan organisasi non pemerintah yang sistem kerjanya mengarah terhadap perubahan struktur atau sistem, daripada perubahan dalam level per kasus maupun individu. Gerakan bantuan hukum bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan. Dengan penelitian hukum normatif, diharapkan ini dapat memberikan temuan penting tentang kolaborasi masyarakat, penyedia layanan bantuan, NGO dan CSO dalam perubahan masyarakat. Sehingga, bantuan hukum struktural merupakan strategi bantuan hukum yang didasari oleh gerakan dengan menghilangkan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Selain itu, paralegal perempuan desa dapat berperan sebagai gerakan untuk mewujudkan bantuan hukum struktural bagi perempuan, anak, maupun kelompok margnial lainnya, dan bukan hanya bagi masyarakat miskin. Sudut pandang lama mengenai bantuan hukum tradisional yang tidak berjalan efektif membuat BHS sebagai alternatif berupa bantuan hukum yang dapat didorong dengan gerakan yang dapat menghilangkan ketimpangan gender maupun mengubah struktur yang ada di masyarakat. Partisipasi perempuan sebagai paralegal dalam sebuah gerakan sosial dapat dioptimalkan dengan dukungan dari NGO maupun CSO seperti dari lembaga bantuan hukum. Sehingga gerakan sosial perempuan menghasilkan kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, serta mengatasi diskriminasi. Selain itu, gerakan bantuan hukum perlu fokus dan terstruktur agar hak perempuan terpenuhi. Tantangan bagi paralegal yakni bisa melampaui tugas yang tertuang dalam UUBH.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Gender Struktural; Gerakan Sosial Perempuan; Paralegal Perempuan.

Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jaminan dalam Perbankan

Ni Nyoman Indah Pratiwi, Ryka Yuliana

Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang tidak mengatur secara eksplisit bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan suatu objek jaminan dalam perbankan sehingga menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi masyarakat dan berpengaruh saat keadaan rahasia dagang yang dijadikan objek jaminan dan adanya pengeksekusian barang karena sebab tertentu. Penulisan artikel ini bertujuan dalam mengkaji dan menganalisis pengaturan rahasia dagang sebagai objek jaminan dan pengeksekusian rahasia dagang dalam perbankan. Kemudian, melalui artikel ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yuridis terkait pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan, memberikan sumbangan kepustakaan, dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan. Isu hukum berupa kekosongan norma sehingga menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan dalam perbankan karena mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan tidak memiliki batas waktu selama masih dijaga kerahasiannya. Kemudian terkait pengeksekusian rahasia dagang dapat dilaksanakan berdasarkan pengeksekusian jaminan fidusia mengingat rahasia dagang dapat dibebankan jaminan fidusia. Adapun cara pengeksekusiannya melalui titel eksekutorial, lelang umum, dan penjualan dibawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Rahasia dagang sebagai objek jaminan telah diatur secara eksplisit dan pengeksekusian terhadap rahasia dagang dapat dilakukan dengan penjualan pribadi dan pelelangan yang diatur dalam *Germany Lending and Taking Security Act*. Berdasarkan pemaparan tersebut solusi atas isu hukum dalam artikel ini yaitu Indonesia dapat melakukan amendemen terhadap UU Rahasia Dagang dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan Jerman sehingga memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Indonesia terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan.

Kata Kunci: Objek Jaminan; Perbankan; Rahasia Dagang.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*

Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan *artificial intelligence* dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi *artificial intelligence.*

Kata Kunci: Orisinalitas, Artificial Inteligence, Lagu dan/atau Musik